



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pramuka No. 5 Kendal Telp. (0294) 381457 Fax. 382440 51351

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL
Nomor : 421.102/2781/2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL,

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 015/PAUD/IV/2017 tanggal 1 Agustus 2017 beserta lampirannya yang diajukan oleh Sdr. Siti Kutibah selaku penyelenggara/pengelola pendidikan anak usia dini.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal tentang ijin pendirian satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18).

Memperhatikan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal tanggal 1 September 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KESATU** : Memberikan perpanjangan ijin pendirian pendidikan anak usia dini kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: KB HARAPAN BUNDA
Jenis Layanan	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: RT 02 RW 03
Desa	: Rejosari
Kecamatan	: Ngampel
Kabupaten	: Kendal
Berdiri pada	: 4 Maret 2013
NPSN	: 69877172
Penyelenggara	: Siti Kutibah

- DILAKUKAN SEBAGAIMANA DIKUTU KESATU KEPUTUSAN INI DIWAJIBKAN UNTUK:
1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mintaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 3. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan setempat;
 4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir;
 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.

- KETIGA** : Apabila pemegang ijin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA keputusan ini, maka ijin pendirian ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu berkaitan dengan ijin pendirian ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam isi keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KENDAL
PADA TANGGAL : 18 September 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Camat Ngampel;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngampel;
4. Kepala Desa Rejosari Kecamatan Ngampel;
5. Pertinggal.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan daerah (pemerintahan daerah Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahannya Kementerian Negara Republik Indonesia Nomor 4437, Perlegislatif 10/07/2006), Undang-Undang yang berlaku dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Kecamatan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa di Kementerian Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 58, Tambahan Kementerian Negara Republik Indonesia Nomor 47043.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penganggaran Dalam Pemerintahan daerah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kecamatan/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Kementerian Negara Republik Indonesia Nomor 47072).